



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 52 TAHUN 2010
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 10 FEB 2010

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 10 FEB 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

M. ISKANDAR ARIFIN, SKM.M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP : 19531204 197603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 52

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	URUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Penataan Ruang	a. Evaluasi dan Revisi Perda RTRW Kabupaten Banyumas dan RUTRK setempat	Alih fungsi lahan yang tidak sesuai RTRW dan RUTRK setempat	DCCKTR
		b. Peningkatan jumlah ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan	Ruang terbuka hijau di perkotaan kurang dari 30-% dari luas kawasan	DCCKTR
		c. Penurunan pelanggaran terhadap Perda tentang penataan ruangan dan Perda tentang bangunan	Belum efektifnya Perda No. 6 Tahun 1995 tentang Bangunan	DCCKTR
2.	Lingkungan Hidup	a. Penurunan jumlah kegiatan yang tanpa Amdal, UKL maupun UPL	Banyak kegiatan usaha tanpa Amdal, UKL dan UPL	BLH
3.	Pertanahan	a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan sertifikasi hak atas tanah	Kesadaran masyarakat akan sertifikasi hak atas tanah masih kecil	Sekretariat Daerah
4.	Perumahan dan Pemukiman	a. Pengedalian pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang	Rumah tinggal sebagai investasi	DCCKTR
		b. Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni	29,42 % rumah berkualitas tidak layak huni	Bapermas dan PKB
		c. Peningkatan penyediaan air bersih	Kualitas fasilitas lingkungan permukiman perkotaan perlu ditingkatkan	Dinas ESDM
		d. Peningkatan Pembangunan jaringan sanitasi	Kualitas fasilitas lingkungan permukiman perkotaan perlu ditingkatkan	Dinas ESDM

	e. Peningkatan pengelolaan sampah	Kualitas fasilitas pemukiman perkotaan lingkungan ditingkatkan	DCKTR
5.	Pekerjaan Umum		
	a. Peningkatan kualitas jaringan jalan	• Transportasi • Waktu tempuh yang relatif lama • Manajemen lalu lintas yang kurang profesional	Dinas SDA dan BM
	b. Jumlah pengurangan titik rawan kecelakaan lalu lintas	• Transportasi • Waktu tempuh yang relatif lama • Manajemen lalu lintas yang kurang profesional	Din hubkominfo
	c. Jumlah penyusunan studi manajemen rekayasa lalu lintas	• Transportasi • Waktu tempuh yang relatif lama • Manajemen lalu lintas yang kurang profesional	Din hubkominfo
	d. Jumlah penyusunan master plan jaringan drainase	Perubahan fungsi jaringan irigasi di daerah perkotaan	Dinas SDA dan BM
6.		e. Peningkatan pembangunan jaringan drainase	Dinas SDA dan BM
		f. Penurunan jumlah bangunan irigasi yang rusak	Dinas SDA dan BM
		g. Optimalisasi debit aliran air irigasi	Dinas SDA dan BM
	Perencanaan Pembangunan	a. Jumlah evaluasi dan tindak lanjut hasil studi dan perencanaan yang telah ada	Bappeda
		b. Penginputan kegiatan APBD ke dalam RKPD	DPPKAD

7.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah dan Kepegawaian	a. Jumlah evaluasi dan revisi Perda	Banyaknya Perda yang tidak efektif	Sekretariat Daerah
		b. Peningkatan Pendapatan perkapita 15 % Tahun	Pendapatan perkapita rendah	
		c. Penurunan kesenjangan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan	Kesejangan antara perkotaan dan perdesaan	
		d. Peningkatan PAD	Belum optimalnya penggalan PAD	
		e. Peningkatan pelayanan pada masyarakat	Pelayanan kepada masyarakat yang kurang profesional	
		f. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah	Masih terdapat ego antar perangkat daerah	
8.	Kearsipan	g. Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan keahlian	Pelaksanaan tugas kurang profesional	BKD
		a. Peningkatan pengarsipan dokumen	Kurang memahami arti penting dokumen	Kantor Perpustakaan
9.	Statistik	a. Prosentase tersedianya data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan kebijakan makro	Kurang memahami arti penting data dalam pembangunan	Bappeda
		b. Jumlah pengembangan data statistik daerah	Masih kurangnya data statistik daerah	Bappeda
10.	Komunikasi dan Informasi	a. Prosentase pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika secara optimal	Belum dimanfaatkannya teknologi komunikasi dan informatika secara optimal	DinhuBkominfo
11.	Politik dalam negeri	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada	Pertisipasi masyarakat dalam Pilkada masih kurang	Bakesbangpollinmas
		b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkadaes	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pilkadaes	Bakesbangpollinmas
12.	Industri	a. Peningkatan PDRB dari sektor industri	Pendapatan sektor industri relatif rendah	Dinperindagkop
		b. Pengembangan perusahaan industri sedang dan kecil	Industri sedang dan kecil memungkinkan untuk dikembangkan	Dinperindagkop

13.	Perdagangan	a. Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan dan jasa	Pendapatan sektor perdagangan dan jasa memungkinkan untuk dikembangkan	Dinperindagkop
		b. Prosentase menjaga stabilitas harga	Harga yang tidak stabil	Dinperindagkop
		c. Peningkatan perlindungan terhadap konsumen	Kualitas barang dagangan yang tidak memenuhi syarat	Dinperindagkop
		d. Peningkatan keserasian hubungan antara pedagang formal dan informal	Hubungan yang kurang serasi antara pedagang formal dan pedagang informal	Dinperindagkop
14.	Koperasi dan UKM	a. Peningkatan koperasi	Kuantitas dan kualitas koperasi perlu ditingkatkan	Dinperindagkop
		b. Peningkatan UKM	Kuantitas dan kualitas UKM perlu ditingkatkan	Dinperindagkop
15.	Penanaman Modal	a. Peningkatan Investasi	Jumlah investasi perlu ditingkatkan	BPM dan PP
		b. Peningkatan tenaga kerja terserap	Tenaga kerja terserap relatif kecil	Dinsosnakertrans
16.	Kehutanan	a. Peningkatan areal hutan rakyat	Penurunan luas areal hutan rakyat	Dinpertanbunhut
		b. Jumlah rehabilitasi lahan kritis	Rehabilitasi lahan kritis belum optimal	Dinpertanbunhut
17.	Pertanian	a. Peningkatan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian perlu ditingkatkan	Dinpertanbunhut
		b. Peningkatan luas panen padi atau bahan pangan lainnya	Penurunan areal lahan sawah	Dinpertanbunhut
		c. Prosentase stabilitas harga komoditas pertanian	Harga komoditas pertanian tidak stabil	Dinpertanbunhut
		d. Peningkatan produktifitas padi atau bahan pangan lainnya • Padi sawah (ton/ha) • Padi gogo (ton/ha) • Jagung (ton/ha) • Kedelai (ton/ha)	Produktifitas padi atau bahan pangan lainnya masih rendah	Dinpertanbunhut

	e. Peningkatan indeks nilai tukar petani	Kemampuan tukar produk-produk pertanian masih relatif rendah	Dinpertanbunhut
	f. Peningkatan produksi peternakan • Susu (liter) • Daging (Kg) • Telur (Kg)	Produk peternakan masih rendah	Dinnakan
18.	Perikanan	Produksi masih belum memenuhi kebutuhan pasar	Dinnakan
	b. Jumlah penebaran benih ikan di sungai/peairan umum	Aliran sungai belum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan	Dinnakan
19.	Ketahanan Pangan	a. Peningkatan Pola Pangan Harapan	Bapelluh dan KP
20.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Peningkatan nilai swadaya masyarakat	Bapermas PKB
	b. Peningkatan organisasi masyarakat	Belum semua organisasi masyarakat terdata	Bapermas PKB
21.	Energi dan SDM	a. Peningkatan rasio elektrifikasi	Dinas ESDM
	b. Penurunan penambangan tanpa izin	Masih tingginya penambangan tanpa izin	Dinas ESDM
22.	Perhubungan	a. Peningkatan jaringan trayek	Dinhubkominfo
23.	Pariwisata	a. Peningkatan pengunjung dengan kenaikan 3,8 % per Tahun	Dinporabudpar
	b. Peningkatan pengembangan potensi pariwisata Banyumas	Masih banyak potensi pariwisata yang belum dikembangkan	Dinporabudpar
24.	Komponen PDRB	a. Peningkatan PDRB dari sektor industri	Dinperindagkop

	b. Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan dan jasa	Pendapatan sektor perdagangan memungkinkan untuk dikembangkan	Dinperindagkop
	c. Peningkatan PDRB dari sektor pertanian	PDRB sektor pertanian perlu ditingkatkan	Dinperantanbunhut
	d. Peningkatan PDRB dari sektor bangunan/konstruksi	PDRB sektor bangunan/konstruksi memungkinkan untuk ditingkatkan	Dinas SDA dan BM
	e. Peningkatan PDRB dari sektor angkutan	PDRB sektor angkutan memungkinkan untuk ditingkatkan	Dinhubkominfo
	f. Peningkatan PDRB dari sektor keuangan dan sewa	PDRB sektor keuangan dan sewa memungkinkan untuk ditingkatkan	DPPKAD
	g. Peningkatan PDRB dari sektor jasa	PDRB sektor jasa memungkinkan untuk ditingkatkan	Dinperindagkop
	h. Peningkatan PDRB dari sektor penggalan	PDRB sektor penggalan memungkinkan untuk ditingkatkan	Dinas ESDM
	i. Peningkatan PDRB dari sektor listrik, gas dan air bersih	PDRB sektor listrik, gas dan air bersih memungkinkan untuk ditingkatkan	Dinas ESDM
25	a. Peningkatan angka melek huruf	Masih rendahnya angka melek huruf	Dinas Pendidikan
	b. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah • SD/MI • SMP/MTS • SMA/SMK/MA	Rata-rata lama sekolah belum optimal	Dinas Pendidikan
	c. Pemenuhan target APM • SD/MI • SMP/MTS • SMA/SMK/MA	Belum tercapainya target angka partisipasi murni (APM)	Dinas Pendidikan
	d. Pemenuhan target APK • SD/MI • SMP/MTS • SMA/SMK/MA	Belum tercapainya target angka partisipasi kasar (APK)	Dinas Pendidikan

		e. Penurunan angka putus sekolah • SD/MI • SMP/MTS • SMA/SMK/MA	Masih tingginya angka putus sekolah	Dinas Pendidikan
		f. Peningkatan angka melanjutkan • SD/MI • SMP/MTS • SMA/SMK/MA	Masih rendahnya angka melanjutkan	Dinas Pendidikan
		g. Peningkatan angka kelulusan • SD/MI • SMP/MTS • SMA/SMK/MA	Masih rendahnya angka kelulusan	Dinas Pendidikan
		h. Penurunan penyandang buta aksara	Masih relatif banyaknya buta aksara	Dinas Pendidikan
		i. Jumlah melanjutkan program wajar dikdas 9 tahun • SD • SMP	Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun perlu dilanjutkan	Dinas Pendidikan
		j. Jumlah melanjutkan program pendidikan menengah umum/kejuruan • SMA • SMK	Pendidikan umum/kejuruan perlu dilanjutkan	Dinas Pendidikan
		k. Jumlah melanjutkan program pendidikan luar sekolah • Paket A • Paket B • Paket C	Pendidikan luar sekolah perlu dilanjutkan	Dinas Pendidikan
26.	Pemuda dan Olah Raga	a. Peningkatan prestasi olahraga • Provinsi • Nasional • Internasional	Pembinaan prestasi olahraga perlu ditingkatkan	Dinpoarbudpar

		b. Peningkatan wawasan kepemudaan • Provinsi • Nasional • Internasional	Wawasan ditingkatkan	kepemudaan perlu	Dinporabudpar
		c. Peningkatan pembinaan karangtaruna • Tumbuh • Berkembang • Maju • Percontohan	Pembinaan ditingkatkan	karangtaruna perlu	Dinporabudpar
27.	Perpustakaan	a. Peningkatan koleksi perpustakaan 4,2 % per tahun b. Peningkatan jumlah pengunjung 8 % per tahun	Jenis dan jumlah pustaka yang relatif kecil Jumlah pengunjung yang cenderung menurun		Kantor Perpustakaan Kantor Perpustakaan
28.	Kesehatan	a. Peningkatan kesehatan lingkungan • SPAL • Jamban ber-septictank • Rumah sehat perdesaan • Rumah sehat perkotaan b. Jumlah lanjutan program penanggulangan penyakit menular	Masih banyak lingkungan yang belum memenuhi persyaratan kesehatan Program penanggulangan penyakit menular perlu dilanjutkan dan ditingkatkan		Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
		c. Pengupayaan pelayanan kesehatan yang terjangkau	Biaya kesehatan relatif mahal		Dinas Kesehatan
		d. Peningkatan program penyalahgunaan penggunaan obat terlarang	Masih banyak kasus penyalahgunaan obat terlarang		Dinas Kesehatan
		e. Penurunan angka kematian bayi	Masih tingginya angka kematian bayi		Dinas Kesehatan
		f. Penurunan angka kematian ibu	Masih tingginya angka kematian ibu		Dinas Kesehatan

		g. Optimalisasi penanganan status gizi balita • Gizi lebih • Gizi baik • Gizi kurang • Gizi buruk	Penanganan status gizi balita belum optimal	Dinas Kesehatan
		h. Optimalisasi penanganan angka kesakitan • Malaria • DBD • TB Paru • HIV/AIDS • ISPA/Pneumonia • Diare	Penanganan angka kesakitan belum optimal	Dinas Kesehatan
		i. Perluasan cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan imunisasi	Rendahnya cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan imunisasi	Dinas Kesehatan
29.	KB dan Keluarga Sejahtera	a. Penurunan fertilitas penduduk	Program pelayanan KB perlu ditingkatkan	Bapermas PKB
		b. Peningkatan jumlah akseptor aktif	Program pelayanan KB perlu dilanjutkan	Bapermas PKB
		c. Penurunan jumlah Pra KS dan KS 1	Program kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan	Bapermas PKB
30.	Seni dan Budaya	a. Peningkatan penggalan potensi Budaya Banyumas	Masih banyak potensi budaya yang belum tergali secara optimal	Dinporabudpar
		b. Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi Budaya Banyumas	Masih banyak potensi Budaya Banyumas yang belum dibina dan dikembangkan	Dinporabudpar
		c. Optimalisasi pelestarian benda cagar budaya	Program pelestarian benda cagar yang belum optimal	Dinporabudpar
31.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Peningkatan pelayanan KTP	Pelayanan KTP perlu ditingkatkan	Dindikcapil
		b. Peningkatan pelayanan KK	Pelayanan KK perlu ditingkatkan	Dindikcapil

		c. Peningkatan pelayanan Akta Kelahiran	Pelayanan Akta Kelahiran perlu ditingkatkan	Dindukcapil
32.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan	Keterlibatan kaum perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan masih relatif kecil	Bapermas PKB
33.	Sosial	b. Tindaklanjut kasus KDRT a. Peningkatan penanganan kasus penyandang masalah sosial	Kasus KDRT perlu ditindaklanjuti Masih banyak penyandang masalah sosial yang belum tertangani	Bapermas PKB Dinsosnakertarns
34	Ketenagakerjaan	b. Penanganan bencana alam yang terjadi a. Penurunan jumlah penggangguran	Adanya bencana alam yang terjadi Masih relatif banyaknya penggangguran	Dinsosnakertarns Dinsosnakertrans
35.	Ketransmigrasian	a. Peningkatan pengiriman transmigran	Relatif kecilnya jumlah pengiriman transmigran	Dinsosnakertrans
36.	Kasatuan Bangsa dan Politik dalam negeri	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PILKADA b. Peningkatan cakupan penanganan kasus PERDA	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Rendahnya cakupan penanganan kasus pelanggaran Perda	Bakesbangpollinmas Bakesbangpollinmas

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO